

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali

Anak Agung Gde Mantra Suarjana¹
Nyoman Indah Kusuma Dewi²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali

²Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali

Kampus Bukit Jimbaran-Bali, Telp.+62 361 701981

E-mail: agungsuarjana@gmail.com¹

ikdewi@pnb.ac.id²

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (3) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Sampel penelitian diambil dengan teknik *Purposive Sampling* sesuai dengan tujuan peneliti dengan beberapa pertimbangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda. Hasil analisis data dengan signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Korelasi dan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur adalah sebesar 0,969 dengan kontribusi sebesar 92,8%.

Katakunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pengembangan Infrastruktur

Abstract: The purpose of this research were: (1) To examine the influence of Local Government Revenue (PAD) towards Infrastructure Development at Bali Province Government. (2) To examine the influence of Balancing Funds on Infrastructure Development at Bali Province Government. (3) To examine the influence of Local Government Revenues (PAD) and Balancing Funds simultaneously on Infrastructure Development at Bali Province Government. The sample of research was taken by purposive sampling technique in accordance with the purpose of the researcher with some consideration. Data collection was done by documentation technique. Data analysis technique used was multiple regression technique. The result of data analysis with significance 0,05 indicated that: Local Government Revenue (PAD) had a positive and significant influence to Infrastructure Development at Bali Province Government. Balancing Funds had a positive and significant influence on Infrastructure Development at Bali Province Government. Local Government Revenue (PAD) and Balancing Funds simultaneously had a positive and significant influence on Infrastructure Development at Bali Province Government. The correlation and contribution between Local Government Revenue (PAD) and Balancing Funds simultaneously to Infrastructure Development was 0.969 with contribution of 92.8%.

Keywords: Local Government Revenue (PAD), Balancing Funds, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Pariwisata Bali sedang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, salah satu indikatornya adalah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 5,076 juta orang pada akhir tahun 2016 dari target 4,4 juta orang. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 5,960 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa daya tarik pariwisata Bali memiliki daya saing, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan asing maupun domestik. Oleh karena itu, destinasi-destinasi baru harus terus dikembangkan terutama yang mempunyai daya tarik wisata. Samimi dkk. (2011) menyatakan bahwa pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekspor yang paling signifikan di banyak negara berkembang. Perkembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan devisa, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata telah menjadi target yang penting bagi sebagian besar pemerintah, terutama untuk negara berkembang. Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pasar tenaga kerja, dan menciptakan peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung melalui penyediaan barang dan jasa yang diperlukan untuk kegiatan wisata. Selain itu, pariwisata menghasilkan manfaat ke daerah seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan infrastruktur (Zaei, 2013). Kamal dan Pramanik (2015) menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang terintegrasi yang meliputi budaya, keindahan pemandangan, tempat arkeologi dan sejarah, sosial politik dan pembangunan infrastruktur.

Berkembangnya industri pariwisata di Provinsi Bali telah mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor industri pengolahan, hiburan, perdagangan dan juga sektor hotel dan restoran. Dengan kondisi yang dimiliki, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi tujuan wisata bagi wisatawan, sehingga kunjungan wisatawan ke Bali terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangannya, terutama sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat. Pesatnya perkembangan pariwisata di Bali akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Wong (2004) menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur industri memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas layanan dan fasilitas publik akan membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam

wujud belanja modal untuk pengembangan infrastruktur. Dengan demikian pengeluaran pemerintah Propinsi Bali untuk pengembangan infrastruktur diupayakan melalui pengeluaran Belanja Modal harus difokuskan untuk pelayanan publik.

Inuwa (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yakni belanja modal merupakan perangkat penting dalam mengendalikan suatu perekonomian. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah dalam membangun aset tetap untuk pelayanan publik, sehingga akan memaksimalkan produktivitas perekonomian. Kartika dan Dwirandra (2014) menjelaskan bahwa produktivitas masyarakat akan meningkat, jika daerah mempunyai layanan publik yang memadai yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan ekonomi akan terwujud ketika infrastruktur serta sarana prasarana terpenuhi yang digunakan dalam kegiatan perekonomian daerah. Alokasi Belanja Modal akan membiayai aset tetap pemerintah daerah. Ketika pembangunan ekonomi daerah meningkat, belanja modal akan ditingkatkan untuk memperbaiki atau melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana agar pembangunan ekonomi tercapai dengan baik. Semakin banyak Belanja Modal, maka produktivitas perekonomian akan semakin tinggi, karena Belanja Modal berupa infrastruktur berdampak pada pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Felix (2012) menilai Alokasi Belanja Modal seharusnya lebih diutamakan daripada belanja lain yang tidak produktif, karena Belanja Modal merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Alokasi Belanja Modal perlu diperhatikan, sebab akan membantu meningkatkan perekonomian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, pemerintah pusat mengucurkan Dana Perimbangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD, walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan di antaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi Belanja Modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007). Penelitian empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antar variabel terkait. Permatasari dan Mildawati (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan itu Sudika dan Budiarta (2017) menemukan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal. Namun, Yossi dkk. (2015) menyatakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Dana Perimbangan, diharapkan adanya peningkatan terhadap Pengembangan Infrastruktur melalui pengeluaran Belanja Modal. Besarnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

biaya Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2005-2017 seperti Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan
dan Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah
Provinsi Bali 2005-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Pengembangan Infrastruktur (Rp)
2005	742.886.075.366,00	261.364.427.278,00	36.579.841.226,00
2006	729.338.159.745,00	421.596.129.577,00	25.202.774.219,00
2007	834.475.057.579,00	525.304.233.965,00	144.279.992.342,00
2008	1.055.454.263.032,00	676.550.871.373,00	122.098.438.548,00
2009	1.163.947.552.786,00	636.608.487.596,00	207.056.912.298,00
2010	1.393.730.257.045,00	649.257.693.410,00	201.468.101.538,00
2011	1.723.807.096.000,00	705.288.133.000,00	227.119.793.000,00
2012	2.042.091.096.000,00	908.371.147.000,00	343.633.987.000,00
2013	2.529.976.147.000,00	980.714.799.000,00	454.469.548.000,00
2014	2.920.416.697.075,00	1.018.431.009.000,00	370.585.305.000,00
2015	3.041.266.607.195,00	1.070.197.147.000,00	562.235.633.000,00
2016	3.041.195.258.000,00	1.867.010.930.000,00	730.924.237.000,00
2017	3.250.531.000.000,00	2.673.596.252.308,00	706.058.699.119,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Bali, 2018

Dari Tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dari tahun 2005-2017. Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2005-2017. Namun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Dana Perimbangan tidak disertai dengan peningkatan biaya Pengembangan Infrastruktur melalui Biaya Modal secara terus menerus, pengeluaran Biaya Modal cenderung berfluktuasi. Pada awalnya pengeluaran Biaya Modal turun dari tahun 2005-2006, selanjutnya naik tahun 2007 dan kembali turun tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2011 pengeluaran Biaya Modal kembali mengalami kenaikan, selanjutnya pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan. Pada tahun berikutnya sejak 2013-2016 terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Dana Perimbangan, namun tidak disertai dengan peningkatan Biaya Modal. Fenomena seperti ini serta masih adanya kesenjangan hubungan antar variabel hasil-hasil penelitian empiris, sehingga penelitian ini menarik untuk dicermati kembali terkait dengan hubungan variabel yang diteliti pada Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada

Pemerintah Provinsi Bali. (3) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yani (2008: 61) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan alam yang ada pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2004: 94) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian-penelitian empiris mengenai hubungan antarvariabel terkait seperti penelitian: Arwati dan Hadiati (2013) menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sianturi (2010) menjelaskan bahwa ada kaitan antara Pajak Daerah dan Alokasi Belanja Modal, semakin besar penerimaan pajak, semakin besar PAD. Olatunji et al. (2009) menyatakan bahwa PAD merupakan sumber dalam pembiayaan Belanja Modal. Nurmala Sari dkk. (2017) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sebaliknya Adyatma (2015) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbagi menjadi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (Aryanto, 2011). Darise (2008: 137) menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Wandira (2013) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal, terdapatnya pengaruh signifikan antara DAU terhadap Belanja Modal, namun berpola negatif. Berbeda dengan DAK dan DBH yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dari Dana Perimbangan memengaruhi besarnya jumlah Belanja Modal. Putri Lestari (2017) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Infrastruktur merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk memberikan gambaran berbagai jenis fasilitas yang dibuat khusus untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan masyarakat umum dalam kehidupan manusia. Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu

dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi/jalan raya, pendataan penduduk, gedung pemerintahan dan berbagai macam kegiatan lainnya. Dalam pengeluaran pemerintah daerah pengembangan infrastruktur indikatornya melalui pengeluaran Belanja Modal.

Mardiasmo (2009: 66) mengemukakan belanja pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu Belanja Rutin dan Belanja Modal. Belanja Modal meliputi Belanja Modal tanah, Belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta Belanja Modal aset tetap lainnya. Sedangkan menurut Halim (2004: 73), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Sumartini dan Murjana Yasa (2015) menemukan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD dan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal. Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Gugus (2013) menjelaskan bahwa PAD adalah sumber untuk menciptakan infrastruktur daerah.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kajian penelitian empiris, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.
2. Hipotesis 2 (H2): Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.
3. Hipotesis 3 (H3): Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data runtun waktu (time series) selama 13 tahun. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengambil data yang sudah terdokumentasi. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 78). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu sesuai dengan tujuan peneliti dengan pertimbangan yaitu: data selama 13 tahun terakhir cukup representative dan relevan sejak diberlakukan otonomi daerah.

Teknik analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan adalah dengan analisis regresi berganda: $Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$. $Y =$ Pengembangan Infrastruktur, $X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan $X_2 =$ Dana Perimbangan, $e =$ error. Model regresi harus diuji dengan asumsi klasik. Pengujian dengan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Adapun uji asumsi

klasik dalam penelitian ini terdiri dari: Uji normalitas data, uji linearitas, uji *multikolinearitas*, *homoskedastisitas* dan uji autokorelasi. Uji normalitas data dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji linearitas data digunakan pendekatan grafik. Uji *Homoskedastisitas* dengan menggunakan Uji *Rho Spearman*. Uji *multikolinearitas* dengan melihat hasil *Tolerance* atau *VIF*. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson digunakan untuk menguji model regresi linear antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2012: 110). Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi (Santoso, 2012: 243). Selanjutnya untuk mempermudah analisis data, maka digunakan aplikasi analisis *multi variate* dengan program IBM SPSS 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *output* SPSS 24 terkait dengan normalitas data variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pengembangan Infrastruktur seperti Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel Dana Perimbangan, dan Pengembangan Infrastruktur, Asymp. Sig. (2-tailed) semuanya lebih besar dari 0,05. Ini berarti semua variabel tersebut berdistribusi normal berdasarkan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 2
Normalitas Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan dan Pengembangan Infrastruktur

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	DANA PERIMBAN GAN	PENGEMBANG AN INFRASTRUKT UR
N		13	13	13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,882,239,636, 000.0000	876,483,943, 100.0000	317,824,097,100. 0000
	Std. Deviation	969,108,198,80 0.00000	463,066,028, 100.00000	236,365,487,300. 00000
Most Extreme Differences	Absolute	.166	.184	.188
	Positive	.155	.184	.188
	Negative	-.166	-.111	-.108
Test Statistic		.166	.184	.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Uji linearitas dengan grafik menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengembangan Infrastruktur, hubungan antara Dana Perimbangan dan Pengembangan Infrastruktur, arah garis ke kanan atas yang menunjukkan hubungan yang bersifat linear dan positif. Untuk autokorelasi diperoleh angka Durbin-Watson 1,398. Angka D-W 1,398 terletak di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi (Santosa, 2012: 243). Uji *Homoskedastisitas* dengan menggunakan Uji *Rho Spearman* terpenuhi, di mana Sig. (2-tailed) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (0,887), Dana Perimbangan (0,972) > 0,05 yang berarti *homoskedastisitas* terpenuhi. Uji multikolinearitas di mana tolerance Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan 0,221 lebih besar dari 0,10 serta VIF = 4,519 < 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi prasyarat asumsi klasik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur.

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur di Provinsi Bali. Hasil Uji T antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur seperti Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji T Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	39866182790.000		-2.653	.024
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	.155	.032	.637	4.834	.001
	DANA PERIMBANGAN	.138	.048	.380	2.883	.016

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Uji T, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui bahwa $t = 4,834$ dengan $Sig. t = 0,001$. Hasil $Sig. t = 0,001$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat

diinterpretasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka Pengembangan Infrastruktur akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti Permatasari dan Mildawati (2016), Arwati dan Hadiati (2013), Sianturi (2010), Nurmala Sari dkk. (2017) yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur.

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 2 (H2). Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini adalah: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Hasil Uji T antara Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali seperti Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji T Dana Perimbangan

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-105748341200.000	39866182790.000		-2.653	.024
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	.155	.032	.637	4.834	.001
	DANA PERIMBANGAN	.138	.048	.380	2.883	.016

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 4 Hasil Uji T, untuk Dana Perimbangan diketahui bahwa $t = 2,883$ dengan $Sig. t = 0,016$. Hasil $Sig. t = 0,016$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Dana Perimbangan signifikan. Artinya Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Artinya, jika Dana Perimbangan meningkat, maka Pengembangan Infrastruktur akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, Wandira (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. DAK dan DBH yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Putri Lestari (2017) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur.

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 3 (H3). Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Hasil Uji F antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali seperti Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6300815738000 00000000000.00 0	2	3150407869000000 00000000.000	78.092	.000 ^b
	Residual	4034214907000 0000000000.000	10	4034214907000000 000000.000		
	Total	6704237229000 00000000000.00 0	12			

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 5 Hasil Uji F, diketahui bahwa $F = 78,092$ dengan $Sig. F = 0,000$. Hasil $Sig. F = 0,000$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan signifikan. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan meningkat secara bersamaan, maka Pengembangan Infrastruktur akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumartini dan Murjana Yasa (2015) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur serta kontribusinya, maka dapat diketahui melalui Tabel 6 Hasil Uji Korelasi.

Tabel 6
Hasil Uji Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.940	.928	63,515,469,830.000 00

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 6 Hasil Uji Korelasi, diketahui bahwa korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur adalah sebesar 0,969. Angka korelasi ini termasuk kategori kuat. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan sumbangan/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 0,928 atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur sebesar 92,8% dan sisanya sebesar 7,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat disampaikan untuk menjawab masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (2) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintahan Provinsi Bali. (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 0,969 dengan sumbangan/kontribusi sebesar 92,8% dan sisanya sebesar 7,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang relevan adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diupayakan seefektif dan semaksimal mungkin, sehingga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat berimplikasi pada peningkatan Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan besarnya Dana Perimbangan yang diterima dari pusat pemanfaatannya dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E. dan Oktaviani, R.M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4, No 2, 190-205.
- Arwati, D., Hadiati, N. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Widyatama, Bandung.
- Aryanto, R. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No 2, 1-13.
- Darise, N. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Jakarta: PT.Indeks.
- Felix, O. (2012). Analysis of The Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in The Local Government System of Ondo State. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 4, No 1, 1-6. Diakses 20 Juni 2018 dari https://www.researchgate.net/publication/311744392_Analysis_of_the_effectiveness_of_capital_expenditure_budgeting_in_the_local_government_system_of_Ondo_State_Nigeria.
- Ghozali, H.I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

- Harianto, D. dan Adi, P.A. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Inuwa, N. (2012). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*, Vol 2, No 3, 718-723. Diakses 20 Juni 2018 dari [http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2\(3\)/2012\(2.3-88\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(3)/2012(2.3-88).pdf)
- Kamal, M. dan Pramanik, S.A.K. (2015). Identifying Factors Influencing Visitor to Visit Museum in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for Museums. *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 17, No 10, 85-92.
- Kartika Jaya, I.P.N.P dan Dwirandra, A.A.N.B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 7, No 1, 79-92.
- Kawedar, W., Rohman, A. dan Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Lestari, W.P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No 6, 1-17.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmala Sari, Djuanda, G. dan Sarwani. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bodetabek Periode 2006 s/d 2015. Prosiding Seminar Nasional “Membangun Paradigma Kehidupan melalui Multi Disiplin Ilmu”. Juli 2017.
- Olatunji, O. C., Asaolu Taiwo, O. and Adewoye, J.O. (2009). A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*, Vol. 3, No 3, 54-60.
- Permatasari, I. dan Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No 1, 1-17.
- Samimi, A. J. (2011). Tourism and Economic Growth in Developing Countries: P-Var Approach. *Middle East Journal of Scientific Research*, Vol. 10, No 1, 28-32.
- Santosa, S. (2012). *Statistik Parametrik : Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumartini, N.K.A dan Murjana Yasa, I.G.W. (2015). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 4, No 4, 258-271.

- Sianturi, A. (2010). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sudika, I.K. dan Budiarta, I.K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-journal Akuntansi*, Vol. 21, No 2, 1689-1718.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No 1, 44-51.
- Wong, J.D. (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 16, No 3, 799-816.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yossi, S. M., Kalangi, J.B. dan Tolosang, K.D.T. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No 1, 1-14.
- Zaei, M.E and Zaei, M.E. (2013). The Impact of Tourism Industry on Host Community. *European Journal of Tourism Hospitality and Research*, Vol 1, No 2, 12-21. Diakses 15 Juni 2018 dari <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/THE-IMPACTS-OF-TOURISM-INDUSTRY-ON-HOST-COMMUNITY.pdf>